

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(2), 73–82. <https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.6>
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1). Syakir Media Press.
- Aji, N. W. A., Supriyono, B., & Shobaruddin, M. (2023). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Anjungan Dukcapil Mandiri. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 63–72. <https://j.iap.uob.ac.id/index.php/jiap>
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (2nd ed.). Pustaka Setia.
- Arma, F., Hamka, H., & Juharni, J. (2020). Peningkatan Pelayanan Ktp-Ektronik Melalui Inovasi Jemput Bola Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(2), 74–80. <https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.384>
- Auliak, N. P., & Hardjati, S. (2023). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu Tuntas Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. *Journal of Governance and Local Politics (JLGP)*, 5(1), 67–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jglp.v5i1.765>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Analisis Profil Penduduk Indonesia. In *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/>
- Dewi, R. C., & Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>
- Dewi, R. S. (2020). *Proyeksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2020*. Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--proyeksi-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik-2020>
- Dharmawan, M. F., & Marbun, R. (2021). Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terkait Tindakan Maladministrasi Tahun 2019. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 285–304. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.292>

- SOP Pelayanan Keliling Jemput Bola (PALING JEMPOL), Pub. L. No. SOP/PPP/24, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan 1 (2019).
- Kasih, P. B., & Harsanti, H. (2022). Implementasi Program Jemput Bola Layanan e-KTP Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tehan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Registratie*, 4(2), 114–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2809>
- Klik Madiun. (2018). 11 Ribu Belum Rekam E-KTP, Dukcapil Jemput Bola ke Sekolah. <https://www.klikmadiun.com/2018/12/11-ribu-belum-rekam-e-ktp-dukcapil.html>
- Mayasari, D. (2019). Peningkatan Kepatuhan Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Guna Meminimalisir Terjadinya Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Prosiding Seminar Stiami*, 6(1), 60–67.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya
- Muljanto, M. A. (2021). Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), 169–181. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v5i2.1386>
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 126–138. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>
- Ombudsman RI. (2022). Laporan Tahunan 2022. In *Ombudsman Republik Indonesia*. <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Laporan-Tahunan/20230216-bca-ar-2022-indonesia.pdf>
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Puryatama, A. F., & Haryani, T. N. (2020). Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Indonesia. *Kybernan : Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 40–54. <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/view/580/433>
- Puspitasari, F. F. (2019). Implementasi Pelayanan Prima Sebagai Upaya Meningkatkan Marketing Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1). J-MPI homepage: <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jmpi/index>
- Ratnasari, B. M., Domai, T., & Hayat, A. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kerjasama Desa dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Pasuruan (Studi Dwi Situs di Desa Jarangan Kecamatan Rejoso dan Desa Durensewu Kecamatan Panda. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(2), 164–173.
- Rianti, S., Rusl, Z., Yulian, F., & I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 15(3), 412–419. <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i1.7>
- Siagian, S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- SOP Pelayanan Keliling Jemput Bola (PALING JEMPOL), No. SOP/PPP/24, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan (2019).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Nomor 188/12/kept.403.111/2021 tentang Inovasi Pelayanan Keliling Jemput Bola (PALING JEMPOL)
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan* (Vol. 42, Issue 13, pp. 2934–2947). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Wahyono, S., Prihatminingtyas, B., & Purwatiningsih, A. (2019). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Malang. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 1–20.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. PT. Buku Seru.